

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau pengadaan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik, dengan menciptakan keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan. Hal ini juga penentu berhasil atau tidaknya suatu pembangunan secara maksimal. Untuk memaksimalkan pembangunan tersebut peranan pajak cukup besar, karena pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Secara umum pajak bisa di artikan berupa iuran dari warga negara (rakyat) terhadap negara, hal ini berdasarkan dari Undang-undang yang mana sifatnya di paksakan dan warga negara tersebut tidak mendapat balas jasa (imbalan) secara langsung. Menurut Soemitro (2011:01), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai (*public investment*).

Pajak berdasarkan pemungutannya terdiri atas 2 bagian yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai (Prasetyono, 2012:15). Sedangkan pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Contoh pajak daerah yaitu pajak reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor dll (Siahaan, 2005:10).

Di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan pemerintah mengerti dengan masyarakat daerahnya dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan syarat suatu keberhasilan pembangunan. Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Menurut Slamet (2005:108), PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan suatu pendapatan daerah, pajak daerah memiliki peran yang sangat penting. Pajak daerah dipungut secara langsung oleh daerah tersebut. Pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Pajak daerah bermanfaat untuk meningkatkan PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu hasil pendapatan daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya berasal dari pajak reklame. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Kontribusi adalah iuran atau dana yang dapat membantu jalan suksesnya kegiatan (Soekarto, 2006:269). Kontribusi yang dimaksud adalah seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak reklame terhadap penerimaan daerah. Untuk mengetahui kontribusinya dapat dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan pajak reklame dengan penerimaan seluruh PAD pada tahun tertentu. Kontribusi pajak reklame tergantung kepada penerimaan pajak reklame. Jika penerimaan pajak reklame meningkat akan memberikan kontribusi lebih pada penerimaan pajak daerah.

Kota Padang merupakan salah satu kota tertua di pantai barat lautan hindia. Hari jadi Kota Padang ditetapkan oleh pemerintah tanggal 7 agustus 1669.

Penetapan ini sesuai dengan momen penyerbuan yang heroik oleh para pejuang ke loji Belanda di Muara Padang ketika itu hingga loji tersebut hangus terbakar. Kota Padang memiliki banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kota Padang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Bapenda di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Bapenda membantu Walikota melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kota Padang dari tahun 2014-2018 realisasi penerimaan pajak reklame dan PAD adalah tahun 2014 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp 3.389.971.900 dengan PAD sebesar Rp 315.678.797.930, tahun 2015 realisasi penerimaan reklame Rp 5.618.654.300 dengan penerimaan PAD Rp 370.413.732.165, tahun 2016 realisasi penerimaan reklame Rp 8.551.921.216 dengan total penerimaan PAD sebesar 391.925.662.646, tahun 2017 realisasi peneriman reklame Rp 7.651.410.083 dengan total penerimaan PAD Rp 456.295.916.658, dan 2018 realisasi penerimaan PAD Rp 7.132.554.659 dengan total penerimaan PAD sebesar Rp 487.655.433.745. Penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan dan tahun 2017-2018 mengalami penurunan Sedangkan penerimaan PAD mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul "**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BAPENDA KOTA PADANG**".

1.2 Rumusan Masalah

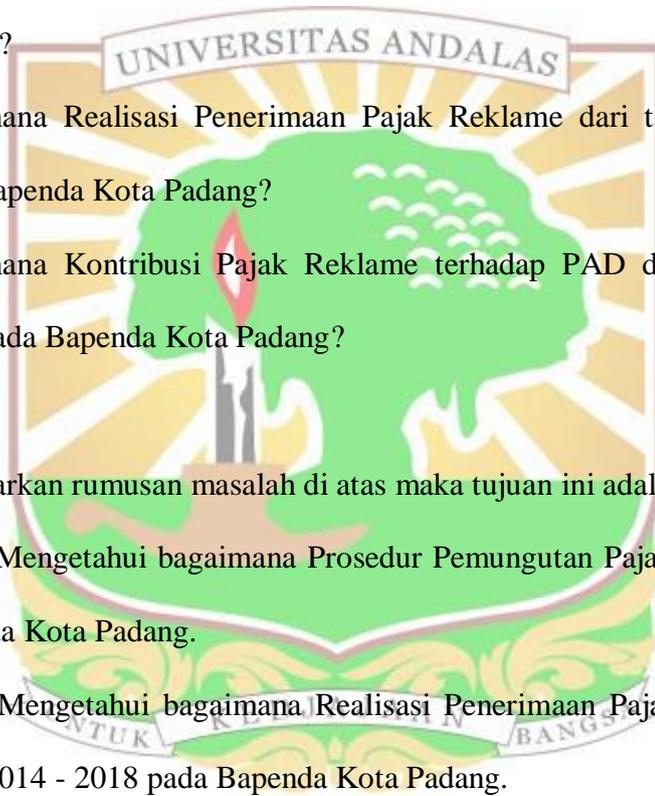
Adapun rumusan pada masalah ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Bapenda Kota Padang?
2. Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2014-2018 pada Bapenda Kota Padang?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD dari tahun 2014-2018 pada Bapenda Kota Padang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Bapenda Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2014 - 2018 pada Bapenda Kota Padang.
3. Untuk Mengetahui bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD dari tahun 2014 - 2018 pada Bapenda Kota Padang.



1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas guna melengkapi (*Field Research*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan satu sama lainnya. Sistematika penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai dalam suatu studi dan pembahasan mengenai pajak, pajak reklame, PAD dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan uraian tugas dan struktur organisasi perusahaan dan aktifitas perusahaan yang dilakukan Bapenda Padang.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini membahas data dari informasi penelitian, dianalisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dengan tujuan pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan aktifitas perusahaan dan juga manfaat untuk mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja atau magang.

